

## **FRIEDRICH EBERT STIFTUNG DAN SOSIAL DEMOKRASI: MEMAHAMI AKTIFITAS GERAKAN SOSIAL GLOBAL DALAM PENYEBARLUASAN DISKURSUS DI INDONESIA**

*Friedrich Ebert Stiftung and Social Democracy: Understanding the Activities of  
Global Social Movement in Dissemination of Discourse in Indonesia*

**Aspin Nur Arifin Rivai**  
Departemen Hubungan Internasional  
Universitas Indonesia  
Email: askaspin@gmail.com

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the continuity of Friedrich Ebert Stiftung (FES) as Social Democracy agent in Indonesia. This paper begins with a fundamental question: how is the effort done by transnational actors? This paper takes the concept of a global community network by Charles Tilly (1978). This paper argues that the existence of FES in Indonesia has very complex challenges in developing Social Democracy. It began when Social Democracy was categorized as part of communism by the Soeharto regime. The fall of authoritarian leadership had a good impact for FES, which is increasingly flexibility in developing the discourse. Clearly, the discourse of Social Democracy requires a democratic system sheltered by the Reformation era. The FES, which had only partnered with the labor movement in the authoritarian regime, gradually turned to various actors such as political parties and epistemic groups in the current Reformation era. Sustainability is interpreted as a pattern of "discourse reproduction" which was closed, then open and approach to various activities such as social, political-economy, and security. The greatest challenge of FES when reproducing social discourse in the era of reformation is: (1) there is still construction in the society that Social Democracy as part of communism, (2) the emergence of political mobilization conducted by FES and (3) FES has not been able to give concrete offer on the principle of Social Democracy in the implementation of social and political situation in Indonesia.*

*Keywords: Friedrich Ebert Stiftung, Social Democracy, Discourse, and Global Social Movement*

### **ABSTRAK**

Tulisan ini merupakan telaah keberlangsungan Friedrich Ebert Stiftung (FES) dalam diskursus Sosial Demokrasi di Indonesia. Tulisan ini berangkat dari pertanyaan mendasar yaitu, bagaimana upaya yang dilakukan aktor transnasional tersebut? Tulisan ini mengambil dua bentuk konsep yaitu: jaringan masyarakat global menurut Charles Tilly (1978). Tulisan ini berargumentasi bahwa eksistensi FES di Indonesia memiliki tantangan yang sangat kompleks dalam mengembangkan Sosial Demokrasi. Mulanya, Sosial

Demokrasi dikategorikan sebagai bagian dari ideologi komunisme oleh rezim Soeharto. Tumbangnya kepemimpinan otoritarian membawa dampak cukup baik bagi FES yang semakin leluasa dalam mengembangkan wacana tersebut. Jelasnya, wacana Sosial Demokrasi membutuhkan sistem demokratis yang dinaungi oleh Reformasi. FES yang tadinya hanya bermitra dengan gerakan buruh di rezim otoritarian, berangsur ke berbagai aktor seperti partai politik dan kelompok epistemik di era Reformasi saat ini. Keberlangsungan tersebut dimaknai sebagai pola “reproduksi wacana” yang tadinya tertutup, kemudian terbuka dan menyentuh berbagai aktifitas seperti sosial, ekonomi-politik, dan keamanan. Tantangan terbesar FES saat mereproduksi wacana Sosial di era Reformasi ialah: (1) masih adanya konstruksi di tengah masyarakat bahwa Sosial Demokrasi sebagai bagian dari komunisme, (2) lemahnya mobilisasi politik yang dilakukan oleh FES, dan (3) FES belum mampu memberi tawaran konkrit mengenai prinsip Sosial Demokrasi dalam implementasi kehidupan sosial dan politik di Indonesia.

Kata Kunci: FES, Sosial Demokrasi, Diskursus, dan Gerakan Sosial Global.

## PENDAHULUAN

Sosial Demokrasi (*The Third Way*) atau yang dikenal sebagai pembaharuan dari konsep Negara kesejahteraan (*welfare state*) mulai beresonansi di akhir perang dingin. Paradigma ini sejatinya perluasan dari spektrum sosialisme. Meskipun tesis Francis Fukuyama menyebut kemenangan paradigma berakhir pada kubu Kapitalisme-Liberal (Fukuyama, 1989, p. 4), nyatanya paradigma Sosialisme tidak benar-benar hilang.

Paradigma Sosialisme mengalami modifikasi mulai dari bentuk ide, hingga gerakan sosial-politik. Memang, pemikiran Sosial Demokrasi kurang mendapat sorotan dalam mozaik globalisasi, namun wacana ini menggema seiring terjadi krisis kepercayaan warga sipil terhadap Negara yang makin tereduksi oleh dominasi pasar. Orientasi globalisasi ekonomi sebagai wajah dari rezim neoliberalisme lebih menemukan persoalan mendasar, yaitu sampai sejauh mana Negara terlibat dalam ritus perdagangan. Walaupun, pemikiran neoliberalisme selalu memantaskan postur pasar tanpa adanya intervensi berlebih justru menemukan kondisi pelemahan. Panggung globalisasi telah menyertakan suatu sikap dari kubu resisten yang menganggap globalisasi saat ini tidak ada yang berubah, sebab aktornya masih sama – Negara besar (*major power*).

Sementara itu, kisah sukses diskursus neoliberalisme dalam episentrum global mengalami dekandensi. Tahun 2007 dan 2008 silam, negara adidaya Amerika Serikat kembali dilanda krisis keuangan parah, bahkan terparah sejak Selasa Hitam tahun 1929

yang memulai periode Depresi Besar tahun 1930-an. Pemerintah AS dan Eropa melakukan kebijakan-kebijakan pengetatan anggaran (*austerity*) yang harus memotong alokasi sana-sini. Di sisi lain, muncul kelompok-kelompok populis kanan yang mencoba mengaktifkan kembali romantisisme konservatif dengan menafikan sistem norma dan nilai global. Sikap yang dituai semisal AS sendiri dianggap membuat antipati oleh sebagian kalangan. AS secara diam-diam melakukan upaya penyelamatan kepada korporasi yang hampir bangkrut dengan jurus *bailout* untuk menyelamatkan beberapa korporasi paska-krisis. Belum lagi cemoooh dari dunia internasional, seruan-seruan kritis terhadap kegagalan institusi dan pemerintahan global (*global governance*) marak diserukan. Bahkan, Nouriel Roubini mencela G-20 sebagai G-Zero yang tidak memiliki taji apa-apa dihadapan krisis ini:

*“...We are now living in a G-Zero world, one in which no single country or bloc of countries has the political and economic leverage - or the will - to drive a truly international agenda”* (Roubini & Bremmer, 2011, p. 2)

Setelah neoliberalisme dengan prinsip kebebasanya selama lebih dari tiga puluh tahun menghiasi struktur internasional dan selalu bisa bangkit sekalipun seringkali ditimpa krisis, maka Joseph Stiglitz meyakini hantaman keras krisis 2008 telah membuat neoliberalisme lumpuh (Stiglitz, 2009, p. 106). Fenomena krisis tersebut telah memastikan Negara masih memiliki peran sentral. Statisnya Negara dalam poros globalisasi akan memberikan dampak besar dikemudian hari, ungkapan ini telah umpamakan oleh Fukuyama(Fukuyama, 2004). Perkataan Fukuyama sendiri mengarah pada dua hal mendasar, pertama Fukuyama secara langsung memperbolehkan Negara untuk mengintervensi pada persoalan mendasar yaitu ekonomi-politik, dan kedua melawan tesisnya sendiri. Meskipun perdebatan yang paling mengemuka antara pilihan dimana posisi Negara dalam persoalan globalisasi, tentunya teramat panjang telah didiskusikan oleh Sosial Demokrasi. Wacana ini tentu mengemuka secara signifikan semenjak AS melakukan intervensi Negara kepada pasar.

Saat ini, wacana Sosial Demokrasi mulai intensif dalam agenda global, terlihat beberapa aktor internasional yang konsisten menyebarkan diskursus tersebut. Aktor transnasional tersebut bernama Friedrich Ebert Stiftung (FES), yang kemudian berkembang

dan aktif di berbagai belahan Negara, dan utamanya di Negara berkembang. Aktifitas FES di Indonesia dimulai pada tahun 1968 secara aktif dalam mengembangkan diskursus Sosial Demokrasi dengan berbagai cara, salah satunya berafiliasi dengan program pemerintah, LSM, dan lingkungan civitas akademik. Meskipun kelompok ini membangun simpul dan jejaringnya yang cukup lama, namun persoalannya ialah apakah Ia mampu melakukan praktik produksi wacana Sosial Demokrasi di Indonesia sebab di pemerintahan Orde Baru diskursus Sosial Demokrasi dikategorisasi dalam kotak komunisme.

Tulisan ini dibagi menjadi empat bagian. Bagian pertama akan melakukan konsiderasi konseptual untuk memahami aktifitas NGO sebagai gerakan sosial global. Bagian kedua sampai ketiga secara sistematis akan mengulas dan menjawab pertanyaan penelitian berupa perdebatan paradigma antara neoliberalisme *versus* Sosial Demokrasi, praktik wacana Sosial Demokrasi di Indonesia, dan keberlangsungan FES di Indonesia. Bagian terakhir akan memberikan kesimpulan beserta tantangan yang akan di hadapi dua analisis utama penelitian ini yaitu FES dan diskursus Sosial Demokrasi di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, artinya penelitian lebih mengedepankan penggunaan data kualitatif seperti ideologi, nilai, dan pemikiran orang yang diproses dengan menghubungkan fenomena satu dengan yang lainnya. Sekalipun banyak mengandung unsur deduksi, hal ini berarti tidak menjelaskan pada suatu hubungan kausalitas. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang merujuk pada studi literatur. Data primer dan data sekunder digunakan dalam penelitian ini. Penggunaan data lebih banyak berasal dari berbagai rujukan yang menelaah kondisi Sosial Demokrasi di Indonesia.

Teknik analisis data menggunakan metode Analisis Diskursus. Metode ini diarahkan sebagai instrumen dalam menginterpretasi suatu fenomena yang diteliti, yang pada akhirnya terjadi proses pemaknaan. Pada hakikatnya metode ini sangat lekat dengan pendekatan kualitatif. Metode analisis ini hampir didominasi oleh pemikiran Teori Kritis dalam cakupan Hubungan Internasional. Secara metodologis, pendekatan ini berkembang dari pemikiran Marxis dan dapat disebut sebagai neo-Marxisme. (Jackson & Sørensen,

2013).Pemikir teori kritis menolak keberadaan realitas eksternal yang objektif, pemisahan subjek/objek, dan ilmu pengetahuan sosial yang bebas nilai.Menurut para pemikir teori kritis, tidak ada politik dunia yang berjalan menurut hukum-hukum sosial yang tidak dapat diubah.Segala sesuatu yang bersifat sosial, termasuk hubungan internasional yang bersifat historis.Dunia sosial adalah konstruksi ruang dan waktu.Sistem internasional adalah konstruksi spesifik dari negara-negara yang paling berkuasa(Smith, 1994, p. 233).Selanjutnya pendukung ini menganggap pengetahuan tidak akan pernah dapat menjadi netral, baik secara moral, politis, maupun ideologis. Oleh karena itu, pengetahuan mengandung kecenderungan, baik disadari maupun tidak, untuk berpihak kepada kepentingan, nilai, kelompok, partai, kelas, atau bangsa tertentu.

Pada dasarnya teori kritis berupaya untuk menyoroiti kecenderungan-kecenderungan kontra-hegemonik atau resistensi yang terkandung di dalam seluruh struktur politik dan sosial dalam berbagai bentuk(Rupert, 2006, p. 159).Untuk menelaah bagaimana FES dapat membentuk produski diskursus Sosial Demokrasi di Indonesia, terlebih dahulu mendefinisikan “diskursus”itu sendiri.Michel Foucault melihat bahwa ilmu pengetahuan manusia sebagai sebuah system diskursus yang berdasarkan aturan.Diskursus adalah pernyataan yang terperinci, rasional, dan terorganisasi, yang dibuat oleh para ahli(Mills, 2003, p. 53).Definisi yang diungkapkan oleh Foucault lebih mengarah pada analisa linguistik.Penulis menilai untuk menjustifikasi FES sebagai agen yang menyebarkan diskursus, perlu adanya pendampingan definisi yang lebih tepat. Terdapat dua pemikir lain yang disebut sebagai neo-gramscian, mereka adalah Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe. Kedua pemikir ini menjelaskan keterkaitan hegemoni dan diskursus adalah bentuk yang seiring sejalan.Diskursus hegemonik akan berpeluang mendapat kontra diskursus. Munculnya lawan baru tersebut sebagai penantang yang berusaha mendapat posisi hegemoni baru.Diskursus dalam ranah pemikiran teoritik Laclau dan Mouffe dijelaskan sebagai, “*The structured totality resulting from the articulatory practice*”(Laclau & Mouffe, 2001).Mereka menyederhanakan ke dalam analogi:

*“If I kick a spherical object in the street or if I kick a ball in a football match, the physical fact is the same, but its meaning is different. The object is a football only to extent that it establishes a system of relations with other objects, and these relations are not given by the mere referential materiality of the objects but are, socially constructed”*(Laclau & Mouffe, 1987, p. 82).

Pandangan Laclau dan Mouffe mengenai hegemoni secara umum memiliki validitas dalam menganalisa proses disartikulasi dan reartikulasi yang bertujuan untuk menciptakan dan menjaga politik sebagaimana juga kepemimpinan moral-intelektual. Karena itu bagi Laclau dan Mouffe, hegemoni merupakan praktik artikulasi yang membangun *nodal points* yang secara parsial memperbaiki makna dari sosial dalam sebuah sistem *difference* yang terorganisasi(Laclau & Mouffe, 2001, pp. 134-137).

Pertanyaan selanjutnya ialah bagaimana hegemoni dalam konteks politik terjadi? Laclau dan Mouffe melihat bahwa hegemoni akan muncul dalam situasi “antagonisme” yang memungkinkan terbentuknya *political frontier*. *Political frontier* akan menciptakan pertarungan hegemonik, dalam situasi ini akan terbangun apa yang disebut *chain of equivalence* di antara kelompok sosial yang melakukan resistensi terhadap rejim opresif. Dalam upaya produksi wacana sebagai bentuk *counter-discourse*, - suatu agen memastikan apakah tawaran wacananya sebagai jalan keluar dari persoalan atau tidak. Seperti dalam pembahasan yang ditawarkan oleh penulis, terjadi persaingan ketat antara paradigma Neoliberalisme dengan Sosial Demokrasi di palagan globalisasi. Sementara itu, penarikan kesimpulan dengan cara menganalisa hasil temuan (data yang diperoleh), dengan menggunakan kerangka konseptual dan interpretasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gerakan Sosial Global**

Munculnya gerakan sipil sebagai aktor Hubungan Internasional memberi pengaruh komprehensif dalam agenda global. Dalam kerangka kerja gerakan sipil saat ini mengalami perluasan bentuk, yang tadinya hanya bergerak pada ruang isu kemudian lebih serius dalam upaya pengarus-utamaan isu. Transformasi jejaring masyarakat sipil tentunya mengarahkan penulis untuk memahami postulat Friedrich Ebert Stiftung dalam menarasikan Sosial Demokrasi di Indonesia. Sebelum sampai ke pembahasan yang lebih jauh, penulis menggunakan kerangka konsep jejaring/gerakan masyarakat global.

Pada unit terkecil dalam sosial, yaitu individu mulai memantaskan diri mereka sebagai bagian dari proses sosial. Kondisi ini tentu mengambil sikap pada dua pilihan yaitu pembiaran proses sosial berjalan apa adanya atau melakukan upaya resistensi terhadap proses tersebut. Dalam kondisi kedua, secara pasti ditemukan bahwa pola gerakan sosial telah melibatkan berbagai perangkat institusi. Disatu sisi mereka harus berhubungan dengan Negara dan disisi lain menggunakan akses sistem (demokrasi) sebagai agenda mempengaruhi kelompok lain. Sekalipun demikian terminologi “gerakan sosial” ini seringkali implisit didefinisikan secara heterogen terhadap sejumlah fenomena-fenomena sosial dan politik seperti revolusi, sekte-sekte keagamaan, organisasi-organisasi politik, atau satu isu yang mengkampanyekan banyak hal, pada sebuah kesempatan ini didefinisikan sebagai “gerakan sosial”.

Telah banyak perhatian yang membahas gerakan sosial langsung kepada hal-hal yang dianggap paling substantif, di antaranya faktor-faktor yang dihitung bagi proses mobilisasi, atau perbedaan antara gerakan sosial lama (*old social movements*) dengan gerakan sosial baru (*new social movements*). Atau juga dengan mengadopsi sejumlah konsep seperti “aksi kolektif”, “perubahan sosial”, “konflik sosial”, dan seterusnya. Sampai disini, Penulis mengkategorisasi eksistensi FES sebagai gerakan sosial global. Hal ini mengarah pada pencetusan institusi NGO sebagai ruang aktifitas yang mengakomodir dalam berinteraksi dengan masyarakat lain (pemerintah, kelompok masyarakat, dan individu). Secara sederhana, FES merupakan organisasi sosial yang pada hakikatnya menjadi agen internasional dalam penyebaran Sosial Demokrasi. Kehadiran mereka memasuki Negara yang bukan hanya telah menjalankan prinsip demokrasi, melainkan Negara yang menghadapi upaya konsolidasi demokrasi.

Kehadiran FES merupakan gerakan sosial baru (*new social movements*). Argumentasi ini tidak lepas dari konsep gerakan sosial yang ditawarkan oleh Charles Tilly. Tilly melihat gerakan sosial tidak sekedar sebagai ruang yang semu, preferensi gerakan yang berlangsung sejatinya mengarah pada proses politik yang lebih luas, yang mencoba mengeksklusi berbagai kepentingan dengan berupaya mendapatkan akses untuk membangun pemerintahan yang lebih mapan (*established polity*) (Tilly, 1985). Tilly mendefinisikan gerakan sosial sebagai:

*“...sustained series of interactions between power holders and persons successfully claiming to speak on behalf of a constituency lacking formal representation, in the course of which those persons make publicly visible demands for changes in the distribution or exercise of power, and back those demands with public demonstrations of support”.*(Tilly, 1985, p. 306)

Sementara itu, Sidney Tarrow mendefinisikan gerakan sosial sebagai gerakan penentangan kolektif (terhadap pihak elit, otoritas, atau kelompok kultural lain) oleh sekelompok orang yang memiliki kesamaan tujuan dan solidaritas dalam interaksi yang berkelanjutan dengan kelompok sasaran (Tarrow, 1994).

Secara umum Tilly berpandangan bahwa gerakan sosial adalah sesuatu yang terorganisir (*organised*), berkelanjutan (*sustained*), menolak *self-conscious* dan terdapat kesamaan identitas (*shared identity*) di antara mereka-mereka yang terlibat di dalamnya(Tilly, 1985, p. 303). Di samping itu, Tilly juga menekankan mengenai pentingnya melihat gerakan sosial dalam konteks rentang sejarah. Hal ini dipahami sebagai anggapan bahwa setiap gerakan sosial memiliki latar belakang sejarah, dan ini yang membedakan dengan tegas gerakan sosial dengan sejarah bentuk-bentuk aktivitas atau selebrasi politik lainnya. Meskipun terlihat sederhana, suatu bentuk gerakan populer seperti aksi rakyat dan membawa suatu kepentingan tidak dapat di generalisasi sebagai gerakan sosial. Pandangan ini berarti, tidak semua bentuk aksi gerakan populer, aksi rakyat yang mengatasnamakan suatu hal, dan semua orang dan organisasi yang mendukung hal-hal tersebut bisa disebut sebagai gerakan sosial (Tilly, 2004, p. 7).

Pendekatan ini mengarah untuk aktifitas FES lebih mendalam. Pada dasarnya FES sebagai agen yang menyebarkan wacana Sosial Demokrasi, namun untuk mencapai akses kesana, tentunya gerakan ini bersandar pada aktifitas mendasar yaitu bagaimana realitas masyarakat memaknai suatu demokrasi. Untuk merujuk kesana, penulis menganggap aktifitas gerakan sosial global (transnasional) adalah mengakomodir ruang kesadaran sipil ke bentuk simpul pergerakan. Artinya isu yang dibawa oleh FES sendiri tidak berdiri pada isu tunggal, melainkan membawa prinsip yang akan dituangkan dalam prosesi bernegara. Selanjutnya pola aktifitas FES sendiri pertama-tama membangun kesadaran berdemokrasi, mengisi pengaruh dalam membentuk kebijakan hingga aktor politik yang memiliki orientasi

Sosial Demokrasi, dan akhirnya penerimaan prinsip Sosial Demokrasi menjadi prinsip kolektif.

### **Wacana Sosial Demokrasi Indonesia**

Sosial Demokrasi dan Sosialisme Demokrasi merupakan paradigma alternatif dalam level domestik maupun global. Paradigma ataupun teori mengenai Sosial Demokrasi belum memiliki definisi yang seragam, baku dan mengikat. Hal ini berlangsung saat seseorang berbicara Sosial Demokrasi, harus terlebih dahulu memperjelas apa yang dimaksud, dan dengan siapa ia berbicara. Bahkan, mendefinisikan Sosial Demokrasi sebagai suatu istilah yang menjelaskan dirinya sendiri (Gombert, 2016, p. 87). Untuk memudahkannya, penulis mengambil sebuah panduan definisi ilmiah terkait Teori Sosial Demokrasi menurut Thomas Meyer. Meyer menerangkan, pada prinsipnya Sosial Demokrasi sebagai model gagasan dan Sosial Demokrasi sebagai partai politik (atau aliran) selalumemiliki titik-titik temu, meskipun keduanya tidak sama. Sebagai model gagasan, sosial demokrasi harus memiliki tuntutan, bahwa gagasannya berbasis ilmiah terkait norma dan nilai, sedangkan penjabaran dan realisasi hak-hak dasarnya dapat dilakukan di berbagai negara dan kemudian diberlakukan secara konsisten yang tentunya menggunakan sistem demokrasi. Pandangan Meyer sebenarnya mengaburkan istilah “demokrasi liberal/kapitalis” yang patut dikoreksi, tetapi Sosial Demokrasi sebagai perangkat teori dan paradigma yang memiliki definisi keilmiah.

Dalam meluruskannya lagi, Thomas Meyer mengajak kita untuk melihat terlebih dahulu relasi antara demokrasi dan kapitalisme pasar. Bagi Meyer, keduanya mengalami relasi tegang dan berpotensi bagi terkuburnya demokrasi itu sendiri. Ambiguitas terlihat saat Kapitalisme Pasar yang menganggap kebebasan memproduksi dan mempertukarkan barang, sementara Demokrasi yaitu kebebasan bagi semua manusia sebagai hak dasar keputusan demokratis. Meyer beranggapan, bahwa di satu pihak kapitalisme dan demokrasi saling melengkapi. Di lain pihak, Meyer menemukan ketegangan yang unik, sebab pasar yang tanpa kendali bertentangan dengan persyaratan yang diperlukan bagi partisipasi publik. Akhirnya kapitalisme pasar yang memakai istilah “demokrasi” mengalami penilahan bagi Demokrasi itu sendiri, hasilnya menyebabkan ketimpangan ekonomi antar manusia,

perbedaan alokasi sumberdaya materil mengakibatkan perbedaan kesempatan guna berpartisipasi dalam masyarakat dan demokrasi, kapitalisme pasar berfungsi semakin mengglobal, sementara partisipasi demokratis hanya berkuat di tataran nasional. Hasilnya, paradigma ini mengancam struktur-struktur demokrasi di setiap negara (Meyer, 2012). Hal ini kemudian menjadikan Sosial Demokrasi sebagai upaya pelurusan filosofis dan historis dari demokrasi itu sendiri.

Dalam nilai dasar atau prinsip Sosial Demokrasi mengandung tiga, yaitu (Gombert, 2016): (1) “Kebebasan” yang dimana memiliki beberapa tuntunan yaitu kebebasan individu secara mendasar dijamin dan dipastikan, kebebasan mesyaratkan bahwa keputusan politik dilakukan secara demokratis. (2) “Kesetaraan/keadilan” yang merupakan nilai mendasar, jika menyangkut soal pembagian barangbarang/kekayaan masyarakat materil dan non-materiil. (3) “Solidaritas” yang bisa perekat sosial sebuah masyarakat bila didukung oleh (sistem) kelembagaan, namun bukan menjadi pencetusnya. Ketiga prinsip tersebut harus melekat ditengah-tengah masyarakat agar tujuan Sosial Demokrasi yaitu masyarakat berkeadilan mampu tercapai.

Di Indonesia, Sosial Demokrasi sejatinya mengalami pasang surut. Panjangnya perjalanan ideologi Sosial Demokrasi di Indonesia bukan berarti mengalami pengarusutamaan (*mainstreaming*). Aktifitas perkenalanspektrum Sosial Demokrasi di Indonesia mengalami etape yang tidak singkat. Berangkatnya wacana Sosial Demokrasi dapat digambarkan dalam pra-kemerdekaan, yang hanya sebatas ideologi Sosialisme. Jargon Sosialisme yang dimaksud adalah keinginan untuk menciptakan keadilan dan pemerataan terhadap hasil-hasil produksi dan sumber-sumber produksi. Hal ini tentu saja dianggap masih abstrak, sebab gagasan Sosialisme tidak sebatas pola itu saja dan terlebih Sosial Demokrasi.

Meskipun bersifat abstrak, setidaknya penggunaan jargon tersebut menjadi cara ampuh sebagai kontra hegemonik dari wacana kolonialisme. Dalam pra kemerdekaan, terdapat sejumlah tokoh-tokoh yang mendalami pemikiran sosialisme seperti, Sutan Syahrir, Tan Malaka, Mohammad Hatta, dan HOS Cokrominoto. Mereka membuat organisasi sosial dan melakukan perlawanan bawah tanah terhadap pemerintahan kolonialis. Di periode selajutnya mereka turut dalam melahirkan partai-partai sosialis di

Indonesia, seperti PSI. Dalam arus yang sama, tokoh sosialis dari Belanda bernama Sneevliet dengan ISDV (*Inische Sosialis Democratic Vereninging*) yang kemudian mewarnai arah gerakan SI (Sarekat Islam) – menjadi pionir berkembangnya pemikiran Sosialisme. Metomorfosa Sosialisme yang digalangkan oleh SI, lambat laun dikembangkan pemikir mudanya salah satunya Soekarno, yang pada akhirnya sebutan Marhanisme adalah wujud Sosial Demokrasi, sementara itu Hatta dan Tan Malaka menggagas kekuatan ekonomi dan isu-isu kedaulatan (Kleden & Manurung, 2011).

Di awal kemerdekaan, resonansi Sosial Demokrasi cukup terlihat dalam aktifitas politik saat itu. Figur-figur pemimpin menjadikan spektrum sosialisme ataupun paradigma kritis (resisten) menjadi karakter paling utama dalam arsitektur politik Orde Lama. Terlihat oleh berdirinya Partai Sosialis Indonesia dan memiliki representasi mayoritas dalam kabinet di era Demokrasi Liberal.

Masuknya rezim Orde Baru, Sosial Demokrasi mengalami absensi. Pola gerakannya justru berbentuk suatu gerakan bawah tanah dalam bentuk *soft subversive*. Tumbuh kembangnya suatu diskursus tentunya bergantung kepada perlakuan rezim yang berkuasa. Tentunya diskursus Sosial Demokrasi mengalami penyempitan saat rezim otoriter. Dalam mengidentifikasi keberlangsungan diskursus Sosial Demokrasi tidak terlepas dari fase kepemimpinan di Indonesia. Dari masa Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi dapat dikatakan sebagai fase dari tumbuh kembangnya diskursus ini. Pada era pra dan pasca kemerdekaan wacana yang paling mengemuka adalah anti-kolonialisme – dan ini mengarah kepada penggunaan wacana yang resisten, maka pemikiran sosialisme dan komunisme dianggap tepat digalakkan guna menjadi wadah gerakan (Manurung, 2011).

Dalam temuan sejarah misalkan, *Founding Fathers* telah melahirkan gagasannya dalam bentuk buku yang melandaskan pada nilai-nilai Sosial Demokrasi. Meskipun tidak dapat dikategorisasi kesemuanya sama dalam menelaah Sosial Demokrasi, paling tidak corak narasi yang dibangun sebagai strategi melawan kolonialisme. Pada masa Orde Baru, diskursus Sosial Demokrasi mengalami upaya penghancuran secara sistematis oleh aparat Negara. Hal ini disebabkan oleh dua faktor mendasar: (1) orientasi pembangunan di bawah kepemimpinan Soeharto lebih memantaskan pola stabilitas dan pertumbuhan. Hal ini tentunya keluar dari sekte wacana Sosial Demokrasi dan (2) dibawah naungan

kepemimpinan hegemonik terdapat suatu kerangka wacana bahwa Sosial Demokrasi dan sosialisme berada dalam kotak komunisme.

Hadirnya paradigma resistenakan menghalangi stabilitas Negara. Praktis nilai-nilai Sosial Demokrasi yang perkembangannya dalam Orde Lama tidak memperoleh ruang perdebatan pada fase Orde Baru. Meskipun demikian, rezim Orde Baru yang mengkategorisasi diskursus Sosial Demokrasi sebagai bagian komunisme, bukan berarti diskursus ini mengalami keabsenan pada ruang sosial.

Penulis menilai pola gerakan sosial yang terbangun di Orde Baru tetap terjaga meskipun dibawah ancaman senjata. Ruang-ruang gerakan hampir terlihat dengan pendekatan yang sifatnya *soft subversive*. Menganalisa dari teori gerakan dalam pandangan Charles Tilly yang menyebut gerakan sosial adalah sesuatu yang terorganisir, berkelanjutan, menolak *self-conscious* dan terdapat kesamaan identitas di antara mereka-mereka yang terlibat di dalamnya (Tilly, 1985). Pandangan ini dianggap kurang mampu menelaah proses gerakan sosial yang memperjuangkan wacana Sosial Demokrasi hidup dibawah kepemimpinan otoriter.

Beberapa bentuk aktifitas gerakan sosial acapkali hidup pada kelompok terpelajar. Kelompok ini menjadikan rezim otoriter sebagai basis kolektif atau musuh bersama. Alain Touraine mengidentifikasi eksistensi gerakan sosial dengan adanya “konflik dominan” yang sudah ada dalam masyarakat. Konflik dominan dipahami sebagai basis sistem yang meredupkan eskistensi gerakan sosial yang ada. Menurut Touraine, eksistensi gerakan sosial merupakan “perilaku/tindakan kolektif yang terorganisir dari aktor berbasiskan kelas yang berjuang melawan kelas yang menjadi lawan (musuh) dalam untuk mengambil kontrol sosial secara historis dalam sebuah komunitas yang konkrit”. Historisitas yang dimaksud Touraine adalah keseluruhan sistem pemaknaan (*system of meaning*) yang menciptakan aturan-aturan dominan dalam sebuah masyarakat yang sudah terbentuk. (Touraine, 1981, pp. 77-81) Dalam argumentasi Touraine, gerakan sosial merupakan:

*“...the action, both culturally oriented and socially conflictual, of a social class defined by its position of domination or dependency in the mode of appropriation of historicity, of the cultural models of investment, knowledge*

*and morality, toward which the social movement itself is oriented*(Touraine, 1988, p. 68).”

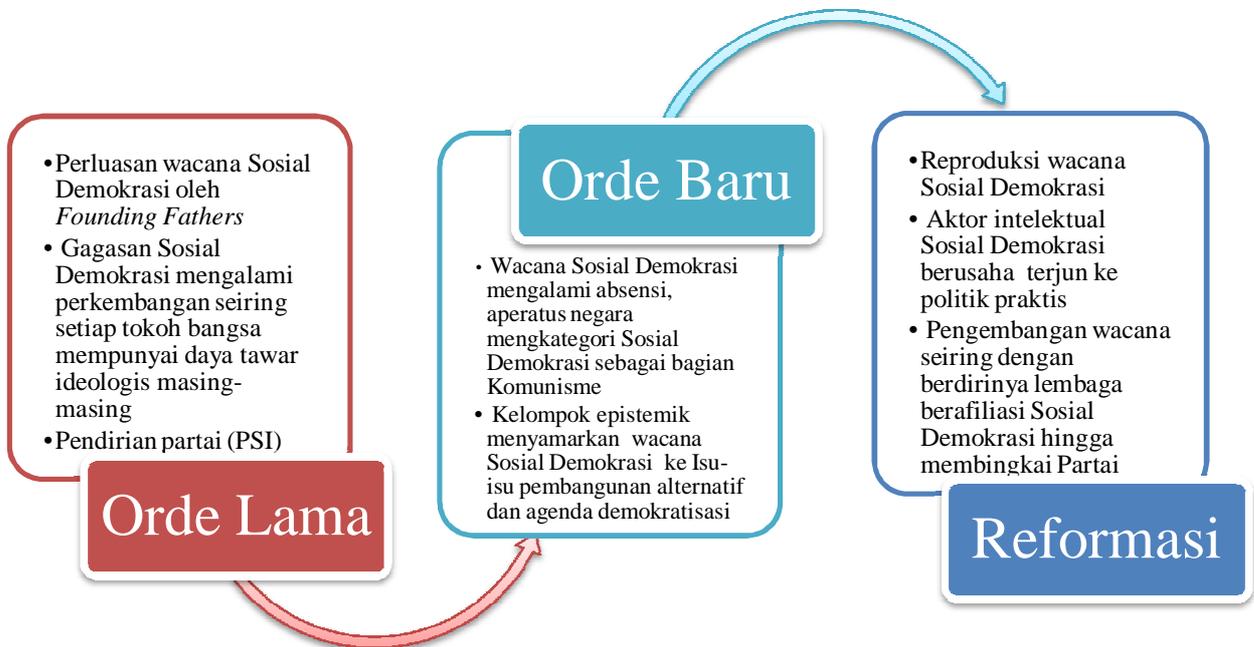
Touraine melihat gerakan sosial dalam konteks gerakan sosial baru. Gagasan Touraine mengenai gerakan sosial sebagai kombinasi dari prinsip identitas, prinsip oposisi dan prinsip totalitas, di mana aktor-aktor sosial mengidentifikasi diri mereka, lawan mereka secara sosial dan tingkatan-tingkatan dalam sebuah konflik. Ruang kolektif lambat laun menjadi aktifitas konstruktif dalam mengembangkan simpul resistensi yang awal mulanya berpola pada aktifitas dan interaksi akademik.

Diskusi dan wacana di atas berputar di kalangan kelas menengah, baik dalam lingkaran civitas akademik maupun LSM, meskipun terbatas dan penuh pengawasan Negara. Wacana-wacana Sosial Demokrasi direduksi, namun agenda gerakan sosial lebih banyak mengkategorisasi sebagai wacana pembangunan alternatif yang pada hakikatnya sebagai haluan Sosial Demokrasi itu sendiri. Pada hakikatnya isu-isu alternatif pembangunan secara langsung membawa isu demokratisasi.

Masuknya gerbang Reformasi, menjadi angin segar bagi wacana Sosial Demokrasi. Konsolidasi demokrasi mengalami tahap penyempurnaan, sekaligus tahap pendefinisian kebebasan ulang. Reformasi pada dasarnya terlihat sebagai bentuk liberalisasi politik, namun tidak menjadi pembatas bagi masuknya gagasan baru dari ideologi yang tengah berkembang, khususnya Sosial Demokrasi. Posisi ini memberi kesempatan besar bagi Sosial Demokrasi mengambil peran dalam “mereproduksi diskursus”. Awalnya, aktor intelektual Sosial Demokrasi berada dalam ruang yang sangat sempit seperti NGO, kemudian di reformasi saat ini, mereka cukup aktif dalam mengkonsolidasikan ide dan wacana ke berbagai aktifitas, seperti: (1) aktifnya agen Sosial Demokrasi dalam memanfaatkan demokrasi di era Reformasi untuk mengikuti kontestasi Pemilihan Umum dan (2) diseminasi informasi berupa ide Sosial Demokrasi yang dilakukan oleh kelompok epistemic secara aktif seperti Uni Sosial Demokrasi (UNISOSDEM) dan *Center for Social-Democratic Studies* (CSDS).

Untuk melihat periodisasi Sosial Demokrasi di Indonesia, Penulis menggambarannya seperti di bawah:

**Gambar 1.** Etape Sosial Demokrasi di Indonesia



### **FES Menjumpai Indonesia: Dari Orde Baru Hingga Reformasi**

Eksistensi gerakan sosial global pada dasarnya memiliki posisi untuk menawarkan globalisasi (*alter-globalization*) dengan prinsip yang dianut (Waterman, 2001, p. 203). Di berbagai sudut gerakan yang ada, tidak kesemuanya mampu terakomodir dalam ruang paling kecil sekalipun, seperti *grassroot* di masyarakat domestik. Gerakan sosial biasanya memiliki preferensi yang berbeda. Terdapat dua pemisah kepentingan secara garis besar. Ada yang sekedar menawarkan gagasan untuk diakomodir dalam sistem yang berlangsung, namun terdapat resistensi total yang menginginkan perubahan sistem menyeluruh. Melihat dua disparitas pola gerakan sosial global atau transnasional, maka patut untuk memahami topik tulisan ini, yaitu eksistensi FES di Indonesia.

Lembaga Friedrich Ebert Stiftung adalah sayap Partai Sosial Demokrat (PSD) di Jerman. Lembaga ini memulai kegiatannya di Jerman dengan memberikan beasiswa kepada pelajar dari keluarga yang berlatarbelakang kelas pekerja. FES yang berdiri sejak tahun 1925 pada dasarnya merupakan warisan politik dari presiden pertama Jerman yang terpilih

secara demokratis – yang pada akhirnya lembaga ini melabeli namanya sesuai persiden tersebut, yaitu Friedrich Ebert.

Aktifitas FES dalam tingkat global yaitu memperkenalkan wacana Sosial Demokrasidi lebih 100 negara, salah satunya di Indonesia yang memulai kiprah pada tahun 1966. Dalam membangun wacana Sosial Demokrasi di Indonesia, mulanya FES mengundang delegasi buruh ke Jerman untuk mempelajari hubungan industrial. Pada tahun 1967, program ini dilanjutkan dengan program pelatihan kepada para serikat buruh dan pejabat Direktorat Jenderal Koperasi yang diadakan di Indonesia.

Awal mula kehadiran FES di Indonesia disatu sisi memperlihatkan model simpati di kalangan birokrasi, bahkan kerjasama yang dilakukannya semakin mudah sebab Menteri Tenaga Kerja pada saat itu dan kemudian menjadi Duta Besar Indonesia untuk Jerman yaitu Prof. Awaluddin Yamin. Prof. Awaluddin bahkan tertarik dengan sistem pendidikan politik dan pusat pendidikan dan pelatihan yang dimiliki oleh FES di Jerman (Kleden, 2008, p. 5). Mulusnya gerakan FES di Indonesia tidak hadir begitu saja, tanpa aktor internasional seperti Diplomat. Kehadiran Adam Malik yang saat itu sebagai Menteri Luar Negeri memiliki kedekatan personal dengan mantan kanselir Jerman yaitu Willy Brandt yang membantu dimulainya program FES di Indonesia.

Di bawah kepemimpinan Soeharto, proses penyebarluasan wacana Sosial Demokrasi tidak semulus saat FES memberi bantuan pendidikan semata. Dalam momen kepemimpinan Soeharto bertepatan dengan situasi politik global yang dipisahkan oleh dua kutub negara superior, yang masing-masing negara membawa paradigma berbeda. Liberal-kapitalisme memiliki lawan tanding yaitu Sosialisme-komunisme. Di sisi lain, kepemimpinan Soeharto cenderung membangun relasi kepada negara-negara Liberal-kapitalisme, khususnya AS. Hal ini kemudian, berpengaruh pada orientasi pembangunan Indonesia.

Bagi Penulis, keberpihakan Soeharto pada spektrum Liberal-kapitalisme dikarenakan faktor kedekatan dengan AS, dibanding berpihak ke Uni Soviet ataupun China. Pertentangan roda kepemimpinan Soeharto ke Sosialisme-komunis disebabkan oleh adanya pemberontakan oleh agen komunis di Indonesia pada tahun 1965 (G30S/PKI). Alih-alih,

persebaran atau produksi wacana Sosial Demokrasi di Indonesia mengalami kesulitan yang amat mandalam.

Upaya Soeharto saat itu melakukan pembendungan pemikiran komunisme, sebab ideologi tersebut menjadi musuh Negara. Pembendungan ideologi komunisme tersebut turut serta mempengaruhi kehadiran FES, meskipun komunisme dan Sosial Demokrasi sangat berbeda dan bahkan menjadi lawan tanding saat memperebutkan pengaruh di masa lalu di Jerman. Cara yang dilakukan FES untuk menghindari stigma Negara yang acapkali kabur dalam melihat ideologi kiri, adalah FES tidak menjalin kerjasama dengan kekuatan oposisi.

Analisa penulis menilai saat itu, justru cara yang dilakukan oleh FES bukan pada konsolidasi diskursus Sosial Demokrasi, melainkan upaya pencitraan dengan cara memisahkan antara Sosial Demokrasi dengan komunisme. Pola yang dibangun adalah dukungan partai pemenang, yang tentu saja rezim otoritarian. Hal ini memantaskan dengan pandangan Charles Tilly bahwa sangat sulit gerakan sosial yang sifatnya resisten terhadap rezim hegemonik untuk langsung bersikap represif. Artinya bangunan gerakan sosial sangat bersifat terbuka, disatu sisi perlu adanya pola kerjasama (*cooperation*) atau kompetisi (*competition*). Namun ditahun tersebut (Orde Baru) dianggap sulit untuk mencapai proses politik yang dilakukan oleh agen kelompok sosial – FES.

Tantangan terbesar bagi FES saat itu ialah rezim hegemonik cenderung menempatkan diskursus Sosial Demokrasi masuk ke dalam kotak komunisme. Upaya untuk mengeksklusi kepentingan-kepentingan untuk mendapatkan akses ke roda pemerintahan (*established polity*) dianggap sukar. Kondisi pergerakan sosial tentunya bergantung kepada kepemimpinan yang ada, kemudian saat kepemimpinan tersebut mempersilahkan demokrasi secara mengakar maka akses gerakan sosial bisa dengan mudah menyebrang pada akatifitas-aktifitas politik seperti partai dan pemilihan umum.

Dalam menelusuri hal tersebut, penulis membandingkannya dengan upaya konsolidasi diskursus neoliberalisme. Keberhasilan Neoliberalisme tidak terlepas dari fase historis yang melalui tahap demi tahap. Untuk melihat bagaimana keberhasilan diskursus Neoliberalisme mengalami pengarusutamaan di episentrum global, pemikiran Robert Cox patut mendapat perhatian tentang bagaimana suatu diskursus menjadi hegemoni dalam tatanan sat ini. Teori Struktur Historis yang disampaikan oleh Cox menganggap tindakan

manusia tidak pernah sepenuhnya bersifat bebas, melainkan selalu dibatasi oleh kerangka tindakan. Kerangka tersebut kemudian berbentuk struktur historis, yang di mana suatu kombinasi khusus dari pola-pola pemikiran, kondisi material, dan institusi-institusi manusia yang memiliki derajat koherensi tertentu di antara elemen-elemennya. Struktur ini tidak menentukan tindakan manusia secara mekanis, melainkan menyusun konteks kebiasaan, tekanan, ekspektasi, dan kekangan-kekangan di mana suatu tindakan berlangsung (Cox, 1981).

Dalam bentuknya yang paling abstrak, gagasan mengenai kerangka tindakan atau struktur historis merupakan gambaran akan konfigurasi kekuatan-kekuatan sosial tertentu. Individu dan kelompok dapat saja bergerak dalam tekanan tersebut atau melawan dan menentang tekanan dan kekangan-kekangan tersebut, namun tidak mudah untuk mengabaikan mereka. Di saat mereka berhasil menentang struktur historis yang ada pada saat ini, mereka mendukung tindakan mereka dengan konfigurasi kekuatan-kekuatan sosial yang baru, yaitu suatu struktur tandingan (Jackson & Sørensen, 2013, p. 170). Tiga kategori kekuatan yang dianggap sebagai potensi berinteraksi dalam sebuah struktur historis: kapabilitas material, gagasan, dan institusi. Untuk melihat bagaimana struktur historis neoliberalisme terjadi, penulis menelaahnya dalam sebuah sejarah singkat.

Pada tahun 1947, sekelompok kecil penganjur neoliberalisme membentuk Mont Pelerin Society yang menyatakan diri sebagai penjaga nilai-nilai ideal kebebasan pribadi. Label neoliberal yang dilekatkan pada mereka didasarkan pada keterikatan mereka pada prinsip-prinsip pasar bebas dari teori-teori ekonomi neo-klasik abad ke-19. Untuk memenangkan pertempuran gagasan, Mont Pelerin lantas menghimpun dukungan dana dan politik. Di AS, suatu kelompok berkuasa yang terdiri atas individu-individu kaya raya dan pimpinan-pimpinan korporasi, yang sama-sama menentang kuat semua bentuk intervensi Negara dan regulasi oleh negara dan bahkan paham internasionalisme, mengorganisasi perlawanan terhadap apa yang mereka sebut sebagai “konsensus untuk membangun perekonomian campuran”.

Mereka memberikan dukungan terhadap siapa saja, mulai dari penganut McCarthysme hingga lembaga-lembaga pemikir neoliberal demi melindungi dan memperkuat kekuasaan mereka. Sebelum tahun 1970-an, pengaruh gerakan ini di lingkungan kebijakan

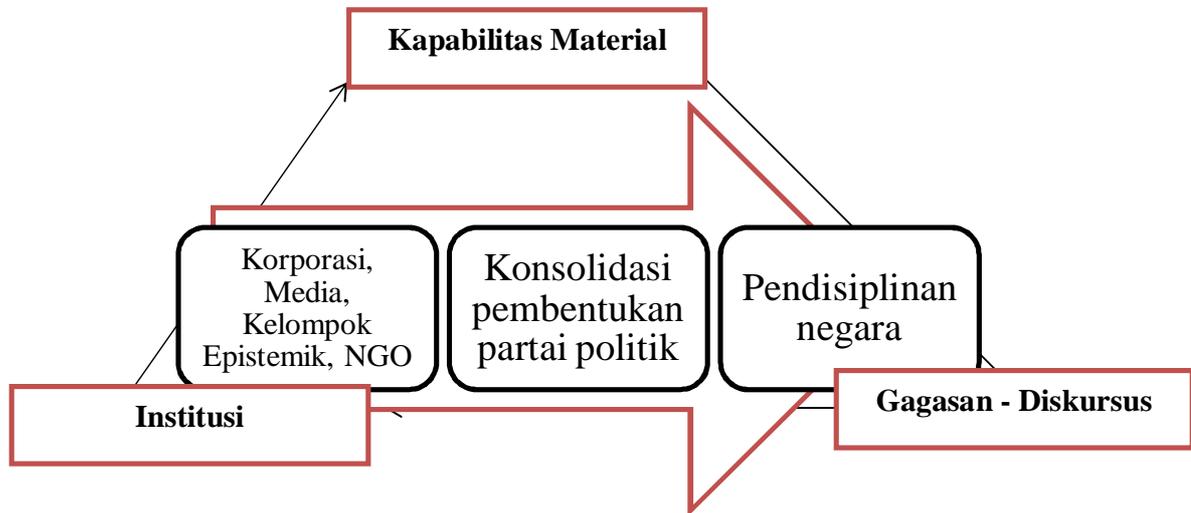
masih sangat terbatas. Pasca tahun 1970-an, mereka mulai masuk ke pusat kekuasaan, terutama di AS dan Inggris dan membangun banyak lembaga pemikir dengan dukungan pendanaan yang besar (misalnya: Institute of Economic Affairs di London dan Heritage Foundation di Washington). Pengaruh mereka di dunia akademik semakin besar, terutama di University of Chicago di mana Milton Friedman menjadi tokoh utama (Gamble, 2001).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada tahap-tahap awal perkembangannya, kaum intelektual (terutama para ahli politik dan ekonomi yang turut menyebarkan paham neoliberal melalui kuliah, seminar-seminar, dengan menjadi tim penasihat, bahkan menteri) sangat berperan dalam menyebarkan neoliberalisme sebagai sebuah ideologi hegemonik. Sebuah studi menunjukkan peran sentral lima orang ekonom paling berpengaruh dalam mengarahkan Amerika Latin, yakni Cardoso (Presiden Brazil), Foxley (Chili), Cavallo (Argentina), Aspe (Meksiko), dan Evelyn Matthei (Chili). Mereka dipandang berhasil menyuntikkan keyakinan neoliberal di negara-negara mereka dan membuat negara mereka masing-masing memeluk kebijakan-kebijakan neoliberal (Wibowo, 2004). Lima orang politisi ini adalah hasil didikan universitas-universitas terkemuka di AS yang beraliran neoliberal, seperti University of Chicago, Harvard University, dan MIT. Ekonomi neoliberal semakin diterima secara luas di seluruh dunia setelah keruntuhan kubu komunis Rusia dan Eropa Timur. Dalam partai sendiri kemudian membentuk simpul gerakan masyarakat sipil (LSM) seperti Friedrich Naumann Stiftung (FNS) di Jerman.<sup>1</sup> Bahkan diskursus neoliberalisme telah nampak pada corak pemerintahan Orde Baru di Indonesia. Untuk melihat mode analisa Teori Struktur Historis, penulis menggambarannya di gambar 2:

---

<sup>1</sup>Friedrich Naumann Stiftung (FNS) adalah sebuah Yayasan politik liberal dari Jerman didirikan pada tahun 1958 oleh Theodor Heuss, presiden pertama Republik Federal Jerman. Aktivitas lembaga ini yaitu mempromosikan kebebasan individual dan liberalism. Pola gerakannya dengan mendukung ide pendidikan masyarakat sipil yang dinilai sebagai upaya partisipasi politik dan demokrasi. Gerakan yang dilakukan oleh FNS sama halnya dengan FES di Indonesia yang sangat terorganisir, namun stigma liberal masih dinilai negatif di mata masyarakat, meskipun di era reformasi. Dengan bekerjasama dengan mitra-mitra lokal, FNS Indonesia memiliki focus di bidang-bidang, di antaranya; Mempromosikan reformasi politik, Mempromosikan HAM dan penegakkan hokum, Mempromosikan kebebasan pasar untuk pembangunan ekonomi, Mempromosikan dialog politik antara individu liberal dan organisasi di Indonesia dan wilayah lainnya, Mempromosikan kerjasama Indonesia-Jerman.

**Gambar 2.** Mode Analisa Struktur Historis



Di Indonesia, peran kaum intelektual dalam menyebarkan neoliberalisme diamati oleh Rizal Malarangeng. Ia menyebut sekelompok kaum intelektual yang mendukung ekonomi neoliberal sebagai “komunitas epistemik neoliberal” yang pada umumnya adalah pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan gelar doktoral di bidang ekonomi-politik dari universitas-universitas AS, seperti Harvard, Cornell, dan University of California di Berkeley (Malarangeng, 2002). Sebagaimana para koleganya di Amerika Latin, mereka juga mengajarkan paham neoliberal untuk mengurangi intervensi negara sekaligus memberikan ruang gerak sebesar-besarnya kepada pengusaha swasta.

Sementara itu, dalam menelusuri pola sebaran diskursus FES, penulis menggunakan tiga kategori visi Sosial Demokrasi itu sendiri. Pada tahun 1969 FES mengusung mandat eksplisit dari Konfederasi Serikat Buruh Jerman (DGB) untuk mewakili gerakan Serikat Buruh Jerman di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di tahun yang sama FES melalui program tersebut bekerjasama dengan kelompok buruh yang ada di Sumatera Utara. Diskursus yang telah dilakukan oleh FES ialah solidaritas (Kleden, 2008, p. 7). Visi ini tertuang dari semangat Sosial Demokrasi bahwa dalam melaksanakan konsolidasi diskursus, perlunya aktor buruh – kelas menengah dalam menggalang aksi kolektif.

Di sisi lain, FES dengan kerangka solidaritas bersama kelompok buruh secara otomatis FES mendapat dukungan dari simpul kekuatan masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Tilly bahwa pola afiliasi solidaritas bersama dengan suatu kelompok lain,

lambat laun yang mencoba mengeksklusi berbagai kepentingan dengan berupaya mendapatkan akses untuk membangun pemerintahan atau tatanan yang lebih mapan (*established polity*). FES menghadapi tantangan akibat solidaritas buruh belum mengakar di rezim yang ada. Perpecahan yang muncul dihiasi oleh disparitas kepentingan dan elitis, serta rendahnya keterwakilan perempuan di perlemen. Dua faktor tersebut membuat FES menghadapi kesulitan dalam memproduksi wacana baik segi solidaritas, maupun kesetaraan.

Keberlangsungan kepemimpinan Soeharto di periode ke enam mengalami konstelasi luar biasa. Sisi internal terjadi keilangannya kepercayaan militer kepada Soeharto, sedangkan sisi eksternal yaitu krisis besar Asia. Perekonomian mengalami defisit – nilai tukar rupiah mengalami batas paling dasar. Kedua faktor ini menjadi pendukung menguatnya aktifitas gerakan sosial untuk melakukan suksesi kepemimpinan yang menjalankan prinsip demokrasi utuh. Gerakan-gerakan yang bermunculan menghiasi beberapa tawaran sistem yang patut ditempuh. Reformasi dianggap sebagai konsolidasi demokrasi, yang dimana sistem dan struktur yang berlangsung di Orde Baru diganti dengan spirit Reformasi yang mencerminkan kebebasan. Penulis melihat momentum ini menjadi kesempatan bagi diskursus Sosial Demokrasi dalam mereproduksi wacana kembali terkait dengan tiga prinsip Sosial Demokrasi (Kebebasan, Keadilan, dan Solidaritas).

Upaya pertama FES yang dilakukan adalah penawaran wacana desentralisasi seperti sistem pemerintahan Jerman. Namun upaya tersebut menghadapi perdebatan, bagi sebagian elit politik menganggap sistem desentralisasi akan membuka jurang konflik antar daerah. FES turut serta membantu proses Reformasi berjalan baik. Pada tahun 1998, FES mengundang Amien Rais yang saat itu sebagai ketua partai PAN ke Jerman untuk menjelaskan pergerakan reformasi baru kepada pemimpin partai PSD dan anggota perlemen majelis federal.

Pertemuan ini menghasilkan dua masukan secara garis besar. (1) FES akan turut membantu upaya demokratisasi di Era Reformasi guna, menciptakan desain yang tidak sekedar demokrasi struktural, melainkan substansial. (2) Jerman akan menjadi mitra negara untuk Indonesia dalam upaya demokratisasi, yang dimana sistem tersebut menjadi prinsip internasional.

Pada tahun 2000, FES mengorganisir sebuah seminar dengan cabang golongan muda PAN dan PKB tentang keterbukaan dan pluralisme dalam partai politik. Hal ini membuktikan FES telah bersentuhan dengan aktor politik, sehingga ada usaha untuk mengembangkan diskursus Sosial Demokrasi (Kleden, 2008, p. 12).

Awal masuknya Reformasi terlihat sebagai fase pengkondisian lembaga Negara terjalin secara demokratis. Peran militer yang tadinya memiliki peran politik (Dwifungsi), mulai dihilangkan. Jumlah partai hingga penyelenggaraan pemilu dilakukan secara akuntabel. Namun proses pematangan demokrasi di awal reformasi menghadapi persoalan baru. Persoalan tersebut adalah konflik horizontal yang berlandaskan separatism hingga agama hampir terjadi di wilayah strategis. Dalam persoalan yang dihadapi oleh Indonesia, FES lambat laun menempuh jalur untuk membantu pemerintah dalam penanganan konflik yang ada.

Di Negara yang mengalami transisi demokrasi seperti Indonesia, program pencegahan konflik menjadi sangat penting karena institusi pemerintahan yang sebelumnya kuat (Orde Baru), telah mengalami perubahan dramatis dan tidak dapat lagi menggunakan kekerasan sebagai jalur penyelesaian konflik. Adanya konflik separatis dari Aceh dan Papua yang mengguncang stabilitas politik Indonesia, FES bersama dengan mitranya yaitu RIDEP, IPCOS, PPRP dan YLBHI mencoba membangun dan mensosialisasikan mekanisme penyelesaian konflik secara damai. Upaya yang dilakukan oleh FES untuk wilayah Aceh adalah mengorganisir kelompok masyarakat muda untuk mendialogkan demokrasi yang ada di sana. Dari bentuk keseriusan yang dilakukan oleh FES dalam pengkondisian demokrasi di Aceh, lambat laun melebarkan kepada agenda reproduksi Sosial Demokrasi (Rais, et al., 2010).

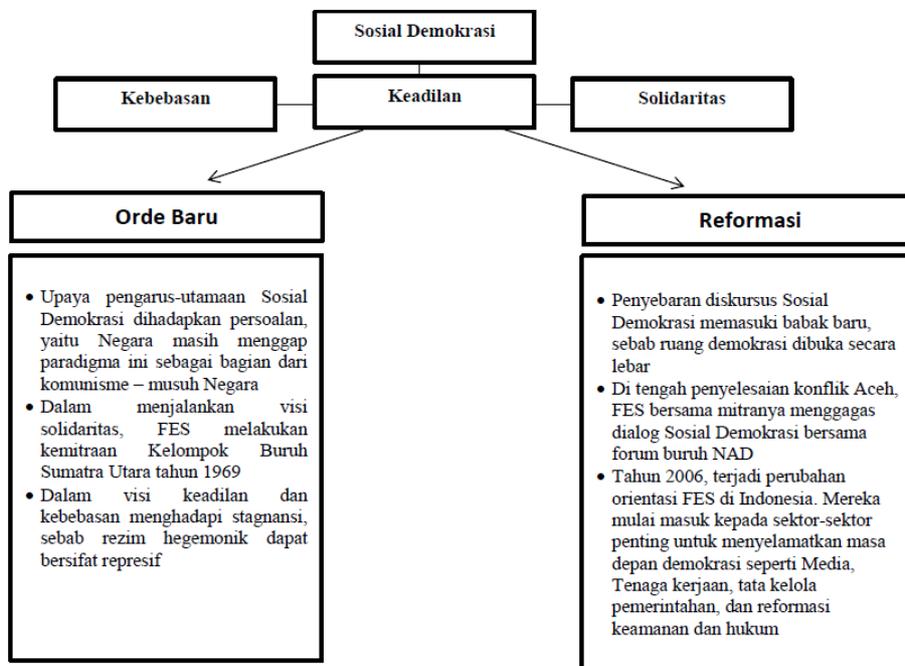
Pada tahun 2003 FES bekerjasama West Papua Network dan Watch Indonesia mengorganisir sebuah konferensi mengenai otonomi khusus berdasar pada keputusan MPR No. IV/1999 tentang Otonomi Khusus Papua dan berikrar untuk menggunakan hukum sebagai alat penyelesaian pelanggaran HAM. Visi ini merupakan perluasan dari diskursus Sosial Demokrasi yaitu keadilan (Kleden, 2008, p. 9).

Pada tahun 2006, FES melakukan pembenahan secara massif tentang kondisi penyebaran diskursus Sosial Demokrasi di Indonesia. Hasrat paling terlihat ialah kemauan

untuk mengimplementasikan program-program reformasi ekonomi sosial dan program yang menciptakan relevansi politik bagi aktor Sosial Demokrasi. Keseriusan ini dengan membuat ruang diskusi Sosial Demokrasi dan penerbitan jurnal yang tentunya berhaluan Sosial Demokrasi. Selanjutnya melakukan dukungan kepada media untuk terus menjaga marwanya yaitu bebas dan independen. agenda yang ditunaikan oleh FES adalah melihat masa depan demokrasi ada ditangan media. Eksistensi FES dalam Reformasi berusaha memasuki sektor-sektor penting, mulai tenaga kerja, dukungan kepada media, reformasi bidang hukum, reformasi sektor keamanan, pengarus-utamaan gender, tata kelola pemerintahan, dst. Untuk hasil-hasil kerja yang nyata dapat dirasakan secara langsung adalah (Kleden, 2008, p. 21): (1) penerbitan publikasi Sosial Demokrasi dan isu-isu reformasi; (2) pendirian Trade Union Care Centre di Banda Aceh yang berkontribusi terhadap proses konsolidasi serikat buruh di Provinsi NAD dan (3) kontribusi dalam penyusunan RUU bidang tenagakerjaan dan reformasi sektor keamanan.

Implementasi prinsip Sosial Demokrasi yang dilakukan oleh FES pada Rezim Orde Baru hingga Reformasi, dapat dilihat dalam gambar tiga:

**Gambar 3.** Praktik Wacana Sosial Demokrasi oleh FES



Proyeksi kerja FES dianggap telah maju, menurut penulis upaya untuk melakukan mobilisasi dengan kelompok masyarakat lain (NGO dan kelompok epistemik) dianggap mempermudah upaya FES dalam mengembangkan diskursus Sosial Demokrasi. Namun dilihat dari etape eksistensinya, justru upaya mendiskusikan Sosial Demokrasi masih menghadapi tantangan. Penulis menilai penyebaran diskursus Sosial Demokrasi belum bisa dikatakan sebagai wacana *mainstream* di Indonesia. Ada tiga faktor utama, yaitu: (1) eksisnya konstruksi sejarah Orde Baru yang melihat Sosial Demokrasi merupakan bagian komunisme; (2) jalannya reformasi justru mempermudah pengarusutamaan Sosial Demokrasi, namun saat ini masih ditemukannya persepsi terhadap kebijakan apakah itu bentuk Sosial Demokrasi atau tidak? Kebijakan yang dijustifikasi sebagai prinsip Sosial Demokrasi, tidak sepenuhnya dipandang sebagai aktualisasi paradigma. Seperti, Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang cenderung dianggap sebagai pilar negara kesejahteraan (Sosial Demokrasi), tetapi bentuk tersebut tidak cukup dikatakan sebagai implementasi Sosial Demokrasi dan (3) mobilisasi politik di era Reformasi yang dilakukan oleh FES mengalami hambatan besar oleh dua faktor di atas. Pengarusutamaan diskursus melalui aktor gerakan dipandang relevan, sebaliknya saat negara masih dominan – maka efektifitas gerakan mengalami pelambatan. Hal inilah yang dihadapi oleh FES saat memberikan alternatif paradigma, tetapi struktur dan sistem negara hanya menjadikan Pancasila sebagai ideologi tunggal.

Sementara itu, untuk melihat FES sebagai gerakan sosial global, sepatutnya tipologi gerakan menurut Ronaldo Munck dapat diperhatikan. Secara mendasar, gerakan sosial global dapat dibedakan menjadi tipe *reformer*, *refusenik*, dan *alternativist*. Gerakan jenis pertama menggunakan PBB untuk melegitimasi peran mereka. Gerakan yang kedua sepenuhnya melepaskan diri dari institusi arus utama dan bergerak untuk melawannya, sedangkan gerakan jenis ketiga dapat dibagi lagi menjadi arus yang lebih “radikal” seperti dalam pendekatan “globalisasi dari bawah” dan yang lebih “reformis,” sebagaimana yang terlihat dalam gerakan buruh internasional yang mencoba mewujudkan “*global social compact*” dan mendemokratisasi globalisasi bagi kebaikan sosial bersama (Munck, 2005). Jika melihat praktik wacana yang dilakukan oleh FES cenderung berbentuk *alternativist* yang bersifat reformis. Terlihat di bawah kepemimpinan Orde Baru dan Reformasi, FES

terlihat kompromis dihadapan sistem yang berlangsung meskipun menerapkan berbagai bentuk aktifitas.

## KESIMPULAN

Tulisan ini sejatinya memperdebatkan eksistensi FES dalam mengembangkan diskursus sosial demokrasi di Indonesia. FES merupakan agen gerakan sosial yang sifatnya transnasional yang membawa paradigma alternatif dalam kerangka domestik maupun global. Awal pendirian FES yang merupakan warisan politik Friedrich Ebert yang kemudian menjadi sayap Partai Sosial Demokrasi Jerman membawa tantangan tersendiri di berbagai negara, utamanya Indonesia. Upaya FES di Indonesia sejak tahun 1968 adalah membangun kepercayaan kepada masyarakat bahwa mereka tetap independen. Hadirnya FES di Indonesia dalam rezim Orde Baru membuat institusi ini harus berjibaku dalam menghindari persepsi Sosial Demokrasi sebagai bagian dari komunisme.

Pelebaran diskursus Sosial Demokrasi di Indonesia, sejatinya bukan atas adanya eksistensi FES itu sendiri. Menurut penulis, FES sebagai stimulus dalam membangkitkan gairah masyarakat – utamanya kelas menengah dalam menggagas diskursus Sosial Demokrasi. Sementara itu, dalam kepemimpinan hegemonik Soeharto yang lebih berorientasi pembangunan modernis, justru mempersempit ruang gerak wacana Sosial Demokrasi. Hal ini terlihat dari kondisi orientasi perdagangan Indonesia lebih bersifat *outward looking*. Meskipun Sosial Demokrasi menganggap globalisasi sebagai jalan pembaharuan, tetapi mereka harus dihadapkan dari dominasi diskursus neoliberalisme sebagai diskursus hegemonik.

Reformasi merupakan angin segar bagi diskursus Sosial Demokrasi. Tetapi, penulis menilai wacana Sosial Demokrasi masih saja mengalami kekosongan, meskipun terjadi keterbukaan ideologi. Menurut penulis, ini lebih disebabkan oleh absennya representasi elit politik yang membawa orientasi Sosial Demokrasi. Pada tahun 2006, FES melakukan perubahan orientasi yang lebih menyentuh berbagai sektor seperti ekonomi-politik, keterbukaan media, pertahanan dan keamanan. Strategi ini sebagai wujud keseriusan FES dalam menyebarkan prinsip Sosial Demokrasi yang bukan hanya pada aspek gagasan,

melainkan kebijakan. Di tahun tersebut terlihat satu wujud yang sederhana, bahwa FES telah melakukan agenda “reproduksi diskursus”.

## DAFTAR PUSTAKA

Cox, R., 1981. Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory. *Millennium Journal of International Studies*, 10(2), pp. 126-155.

Fukuyama, F., 1989. The End of History?. *National Interest*, Issue 16, pp. 3-18.

Fukuyama, F., 2004. *State – Building: Governance and Word Order in the 21st Century*. New York : Cornell University Press.

Gamble, A., 2001. Neoliberalism. *Capital & Class*, 3 November, 25(3), pp. 127-134.

Gombert, T., 2016. *Landasan Sosial Demokrasi*. Jakarta: FES Indonesia.

Jackson, R. & Sørensen, G., 2013. *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*. Oxford: Oxford University Press.

Kleden, P., 2008. *Mendukung Transisi Demokrasi Indonesia: FES 10 Tahun Setelah Reformasi*. Jakarta: FES Indonesia .

Kleden, P. & Manurung, M., 2011. Membuat Demokrasi Sosial Diterima. *Jurnal Sosial Demokrasi*, 11(4), pp. 43-47.

Laclau, E. & Mouffe, C., 1987. Post-Marxist Without Apologies. *New Left Review No.166*, November-December(166), pp. 79-106.

Laclau, E. & Mouffe, C., 2001. *Hegemony and Socialist Strategy : Towards A Radical Democratic Politics*. 2nd ed. London: Verso.

Malarangeng, R., 2002. *Mendobrak Sentralisme Ekonomi: Indonesia 1986-1992*. Jakarta: Gramedia .

Manurung, M., 2011. Melacak Jejak dan Prospek Sosial Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Sosial Demokrasi*, 11(4), pp. 9-28.

Meyer, T., 2012. *Demokrasi Sosial dan Libertarian: Dua Model yang Bersaing dalam Mengisi Kerangka Demokrasi Liberal*. Jakarta: FES Indonesia.

Mills, S., 2003. *Michel Foucault*. London: Routledge.

Munck, R., 2005. *Globalization and Social Exclusion: A Transformationalist Perspective*. Bloomfield: Kumarian Press.

Rais, Y. Z., Elusatri, R. & Zulyadi, 2010. *Dialog Keude Kupe: Perspektif Sosial Demokrasi Rasa Kupu Aceh*. Jakarta: FES.

Roubini, N. & Bremmer, I., 2011. Ian Bremmer & Nouriel Roubini, A G-Zero World: The New Economic Club Will Produce Conflict, Not Cooperation. *Foreign Affairs* , 90(2), pp. 2-7.

Rupert, M., 2006. Marxism and Critical theory. In: T. Dunne, M. Kurki & S. Smith, eds. *International Relations Theories: Discipline and Diversity* . Oxford: Oxford University Press.

Smith, S., 1994. Positivism and Beyond. In: S. Smith, K. Booth & M. Zalewski, eds. *International Theory: Positivism and Beyond*. Cambridge: Cambridge University Press .

Stiglitz, J., 2009. *Freefall: America, Free Market and the Sinking of Global Economy*. New York: Norton Company.

Tarrow, S., 1994. *Power in Movement: Social Movements, Collective Action and Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.

Tilly, C., 1985. Social Movement and National Politics. In: C. Bright & S. F. Harding, eds. *State-Making and Social Movements: Essays in History and Theory*. Ann-Arbor Michigan: University of Michigan Press, p. 306.

Tilly, C., 2004. *Social Movements 1768-2004*. Boulder: Paradigm Publisher.

Touraine, A., 1981. *The Voice and the Eye: An Analysis of Social Movements*. Cambridge: Cambridge University Press (1981): Cambridge University Press.

Touraine, A., 1988. *Return of the Actor: Social Theory in Postindustrial Society*. Minneapolis: University of Minnesota Press .

Waterman, P., 2001. *Globalization, Social Movements and the New Internationalisms*. London: Continuum.

Wibowo, I., 2004. Emoh Negara: Neoliberalisme dan Kampanye Anti-Negara. In: I. Wibowo & F. Wahono, eds. *Neoliberalisme*. Yogyakarta: Cindelas.